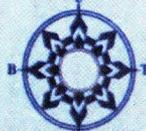


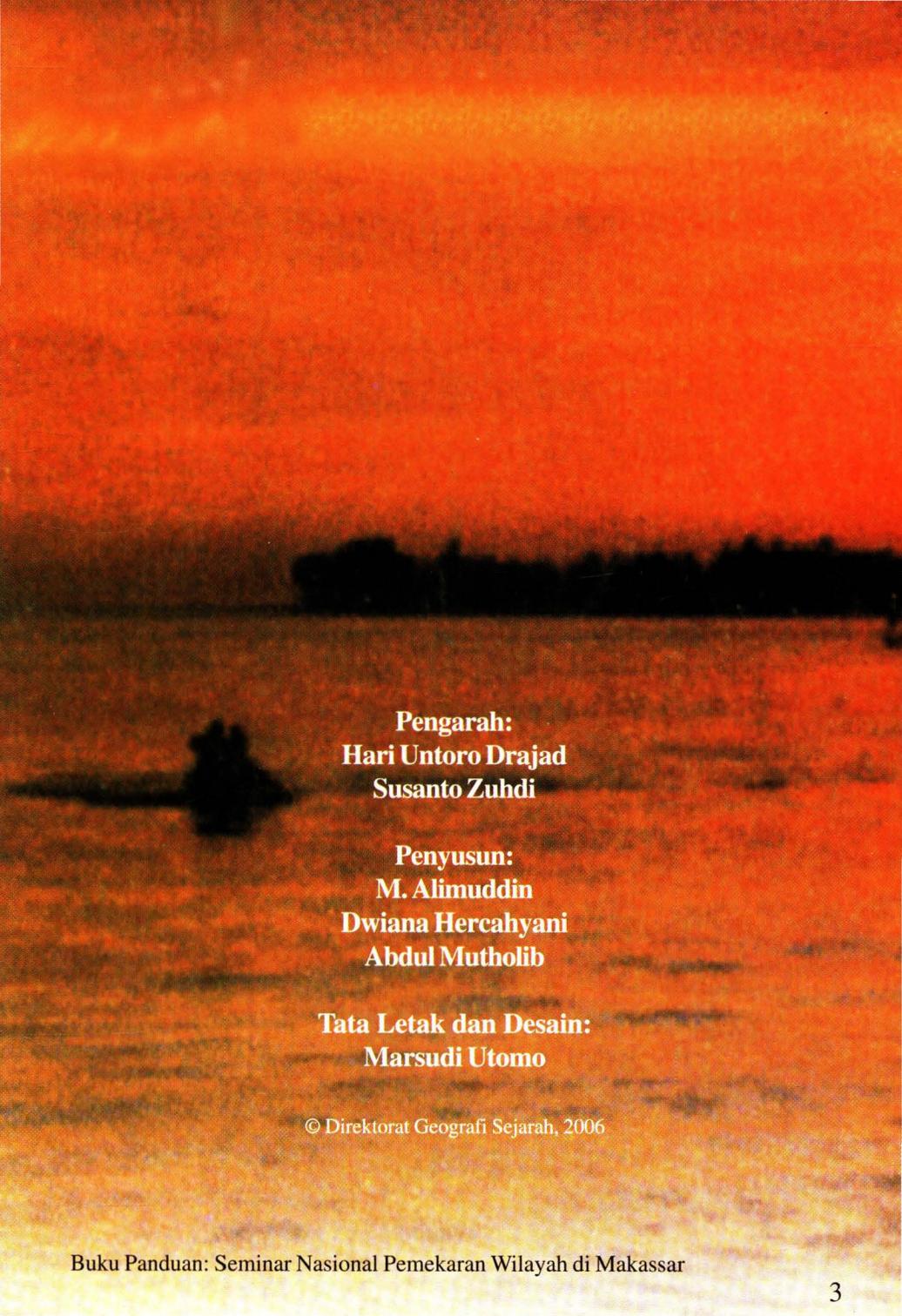


# Buku Panduan: Seminar Nasional Pemekaran Wilayah

Direktorat  
dayaan

Direktorat Geografi Sejarah  
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala  
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata  
2006



The background of the cover is a photograph of a sunset or sunrise over a body of water. The sky is a deep, vibrant orange, transitioning to a lighter yellow near the horizon. The water reflects the colors of the sky. In the foreground, there is a dark silhouette of a person standing on a small boat or pier, looking out towards the horizon. The overall mood is serene and contemplative.

**Pengarah:**  
**Hari Untoro Drajad**  
**Susanto Zuhdi**

**Penyusun:**  
**M. Alimuddin**  
**Dwiana Hercahyani**  
**Abdul Mutholib**

**Tata Letak dan Desain:**  
**Marsudi Utomo**

© Direktorat Geografi Sejarah, 2006



## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

### *SAMBUTAN* *SEMINAR NASIONAL PEMEKARAN WILAYAH* *DALAM PERSPEKTIF SEJARAH*

**Assalammu' alaikum Wr, Wb.**

**S**ebagai Insan yang bertaqwa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendakNya kita dapat berkumpul ditempat ini, dalam rangka Seminar Nasional Pemekaran Wilayah Sulawesi dalam Perspektif Sejarah. Seminar ini mempunyai nilai penting dan strategis di tengah munculnya konflik sosial dan ancaman terhadap persatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Hadirin yang saya hormati,*

**S**udah menjadi catatan sejarah bahwa di Sulawesi ini pada tahun 2000 kita melihat begitu kuatnya aspirasi yang menyebabkan terbentuknya Provinsi baru Gorontalo. Sementara itu terlihat keinginan kuat, daerah-daerah dibagian barat Sulawesi seperti Polmas, Majene, Mamuju, yang kini telah resmi menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Akankah diikuti oleh daerah-daerah yang lain ? Bagaimana kita menyikapi gejala seperti ini ? yang jelas menurut hemat kami, bahwa prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan dan kemandirian.

*Hadirin yang saya hormati,*

Hal cukup penting yang perlu kita perhatikan adalah bahwa sejarah perkembangan pemerintahan Indonesia, tidak terlepas dari sejarah pada masa prakolonial dan masa pemerintahan kolonial. Itu berarti kita perlu mencermati Sistem Hukum dan Sistem Politik dalam konteks kebudayaan daerah masing-masing. Pemberian Otonomi kepada daerah, terkait dengan UU No. 5 tahun 1974, yaitu desentralisasi yang dikehendaki dimaksud tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Walaupun realitas sosial memperlihatkan pluralitas nilai-nilai yang secara historis dan alamiah seharusnya melekat dan terintegrasi ke dalam sistem yang terakomodasi kedalam UU No.5 Thn 1974, dalam perjalanannya telah gagal. Faktor utamanya karena kepentingan politik kekuasaan pemerintah pusat terlalu dominan. Itulah sebabnya UU No. 22 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004, bukan saja maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah dapat tercapai melainkan juga untuk pemerataan pembangunan yang hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

*Hadirin yang saya hormati,*

Sebelum saya tutup sambutan ini saya sampaikan ilustrasi yang mungkin dapat menjadi renungan bersama. Kita umpamakan Negara adalah suatu perusahaan besar yang hampir bangkrut, yang namanya Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan itu hendak membuat kantor – kantor cabang di berbagai daerah di Indonesia yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari gaji Gubernur, Ketua DPRD, kop surat, stempel, papan nama, dan sebagainya; yang paling tidak anggarannya harus disediakan selama 5 tahun, sebelum mandiri. Kita bisa bayangkan bagaimana masa depan perusahaan yang bernama Indonesia itu? Tentu saja ilustrasi tersebut menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya dan mengecilkan potensi serta motivasi kuat untuk melakukan desentralisasi pemerintahan. Namun demikian kita perlu tetap secara kritis mencermati perkembangan pemekaran wilayah di Indonesia, khususnya dalam hal ini di Sulawesi. Itu berarti Seminar ini penting sebagai forum untuk mendiskusikan permasalahan pokok

khususnya dalam aspek Sosial dan Budaya dan harapan yang kita inginkan bersama, sesuai dengan prinsip – prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah. Akhirya saya mengucapkan selamat berseminar, semoga segala aktifitas kita bernilai ibadah. Amiin.

Dengan ucapan “*bismillahirrohmanirrohim*” Seminar Pemekaran Wilayah Dalam Persepektif Sejarah saya buka dengan resmi.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

**Makassar, 25 April 2006**  
**Gubernur Sulawesi Selatan,**

**H.M. Amin Syam**



**SAMBUATAN  
DIREKTUR JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA**

**SEMINAR NASIONAL PEMEKARAN WILAYAH  
DALAM PERSPEKTIF SEJARAH**

*Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan,  
Bapak Ibu yang saya hormati,*

*Assalammu'alaikum Wr. Wb  
Salam Sejahtera buat kita semua*

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas nikmat-Nya kita berkumpul ditempat ini untuk kegiatan "Seminar Nasional Pemekaran Wilayah Dalam Prespektif Sejarah". Kegiatan ini merupakan salah satu dari beberapa kegiatan Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala dalam Tahun Anggaran 2006.

Adanya reformasi yang digulirkan tahun 1988, salah satu agendanya dalam bidang pemerintahan adalah pelaksanaan otonomi daerah dengan landasan hukum Undang-undang No.22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No 32 tahun 2004. Dalam pelaksanaannya hal ini menimbulkan dampak besar. Sistem sentralistik yang dijalankan selama pemerintahan Orde Baru mengakibatkan prakarsa masyarakat hilang, juga dirasakan ketidakadilan dibidang ekonomi keuangan karena terjadinya ketimpangan dalam perolehan pendapatan daerah. isu-isu tersebut mendorong terbentuknya provinsi baru, apalagi Undang-undang otonomi daerah tersebut memberi peluang adanya pemekaran wilayah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan salah satu faktor pembentukan provinsi baru itu juga dilandasi isu sejarah dan budaya masyarakat setempat.

*Bapak Ibu yang saya hormati,*

Pemekaran wilayah yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, mengakibatkan permasalahan-permasalahan seperti konflik-konflik sosial perlu diantisipasi. Menjawab isu-isu yang terjadi tersebut, Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan Seminar Nasional Pemekaran Wilayah. Dalam kegiatan ini akan dibahas tentang kebijakan dalam pelaksanaan pemekaran wilayah di Indonesia dari berbagai sudut pandang, khususnya aspek sosial dan budaya dalam perspektif sejarah, Untuk tahun ini contoh kasus di Sulawesi.

Adapun tujuan kegiatan ini sebagai forum membahas kebijakan, penerapan dan dampak pemekaran wilayah di Indonesia dari berbagai sudut pandang sosial, budaya dalam bingkai NKRI dan merancang bahan rumusan kebijakan pemekaran wilayah dan penanggulangan masalah

*Bapak dan ibu yang saya hormati,*

Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas dukungan yang diberikan kepada kami dalam seminar ini. Khir kata saya mengucapkan “Selamat berseminar kepada para peserta, semoga rumusan seminar ini membawa berkah yang baik bagi kita semua.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

*Makassar, 25 April 2006  
Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala,*

*Hari Untoro Drajad*

## Pengantar:

# DIREKTORAT GEOGRAFI SEJARAH

**G**eografi Sejarah merupakan salah satu sub disiplin ilmu dari Geografi. Meskipun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa geografi pada dasarnya adalah penerapan bersama dari geografi fisik dan geografi sosial di suatu wilayah tertentu (Daldjoeni, 1987 : 10).

Jadi Geografi Sejarah bisa menyangkut pelacakan perluasan wilayah yang dimiliki oleh bangsa-bangsa dan negara Eropa dari waktu ke waktu, juga penandaan batas-batas kewilayahan atau pembedaan makna dari penggunaan nama/tempat yang sama.

Geografi Sejarah merupakan studi tentang perubahan geo dalam kepemilikan wilayah dan batas-batas negara, kerajaan, istana, dan pemerintahan. Meskipun penggunaan konsep atau istilah geografi sejarah secara eksplisit telah mulai sejak abad ke-17 di Eropa, namun perkembangan studi geografi sejarah sendiri baru terasa penting sejak pertengahan abad ke-19. Boleh jadi perkembangan itu ada hubungannya dengan kolonialisme di Indonesia, karena menyangkut perluasan daerah jajahan, penguasaan, hak teritorial dan pengawasan, atau sumber-sumber daya ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Geografi Sejarah sangat dinamis tentunya terkait dengan faktor ideologi, tentu juga faktor perkembangan masyarakat.

Studi geografi sejarah dapat dikembangkan melalui tema-tema dasar yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat seperti rekonstruksi lingkungan fisik atau geografi sejarah lanskap. Jadi geografi sejarah mempelajari

wilayah dan lingkungan alam yang mempengaruhi jalannya sejarah. Sedang dalam konteks perkembangan wilayah perkotaan, geografi sejarah dapat dikembangkan dengan mempelajari morfologi. Perkembangan kota dari masa kuno sampai kota-kota besar, biasanya terkait dengan masalah urbanisasi.

Jadi Geografi dapat diibaratkan sebagai “*panggung*” tempat orang memainkan lakon, dan “*lakon*” itu adalah peristiwa sejarah. Oleh karena itu Geografi dapat dipandang sebagai saksi sejarah. Tema-tema lain yang dapat dikembangkan dalam geografi sejarah di Indonesia adalah kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam.

Penerapan otonomi daerah yang berdampak pada terjadinya pemekaran wilayah dan pergeseran kewenangan bagi batas antar propinsi, antar kabupaten/kota, kecamatan dan antar desa. Pesatnya pembangunan dan adanya pemekaran daerah menyebabkan perubahan fisik daerah dan sering berakibat hilang atau berubahnya batas alam atau batas buatan suatu daerah.

Pengelolaan dan penataan ruang suatu wilayah berkaitan dengan masalah batas daerah. Ruang yang dimaksud merupakan sumber daya alam yang tidak mengenal batas daerah. Perkembangan suatu daerah terkait erat dengan potensi daerah dan pengelolannya secara optimal. Penetapan batas antar daerah yang ada selama ini belum menjamin kepastian secara hukum, sehingga memunculkan masalah baru, terutama tarik menarik batas wilayah perbatasan yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang potensial – batasannya adalah batas wilayah kerja administrasi pemerintahan, ini akan mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya sehingga tidak ada masalah ataupun konflik.

Penanganan konflik perbatasan antar daerah, dibedakan:

1. Konflik batas, meliputi propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Konflik batas yang dimaksud konflik yang terjadi akibat distorsi yang terkait dengan keberadaan aspek-aspek batas daerah secara non-fisik dan fisik.

a. Non Fisik meliputi:

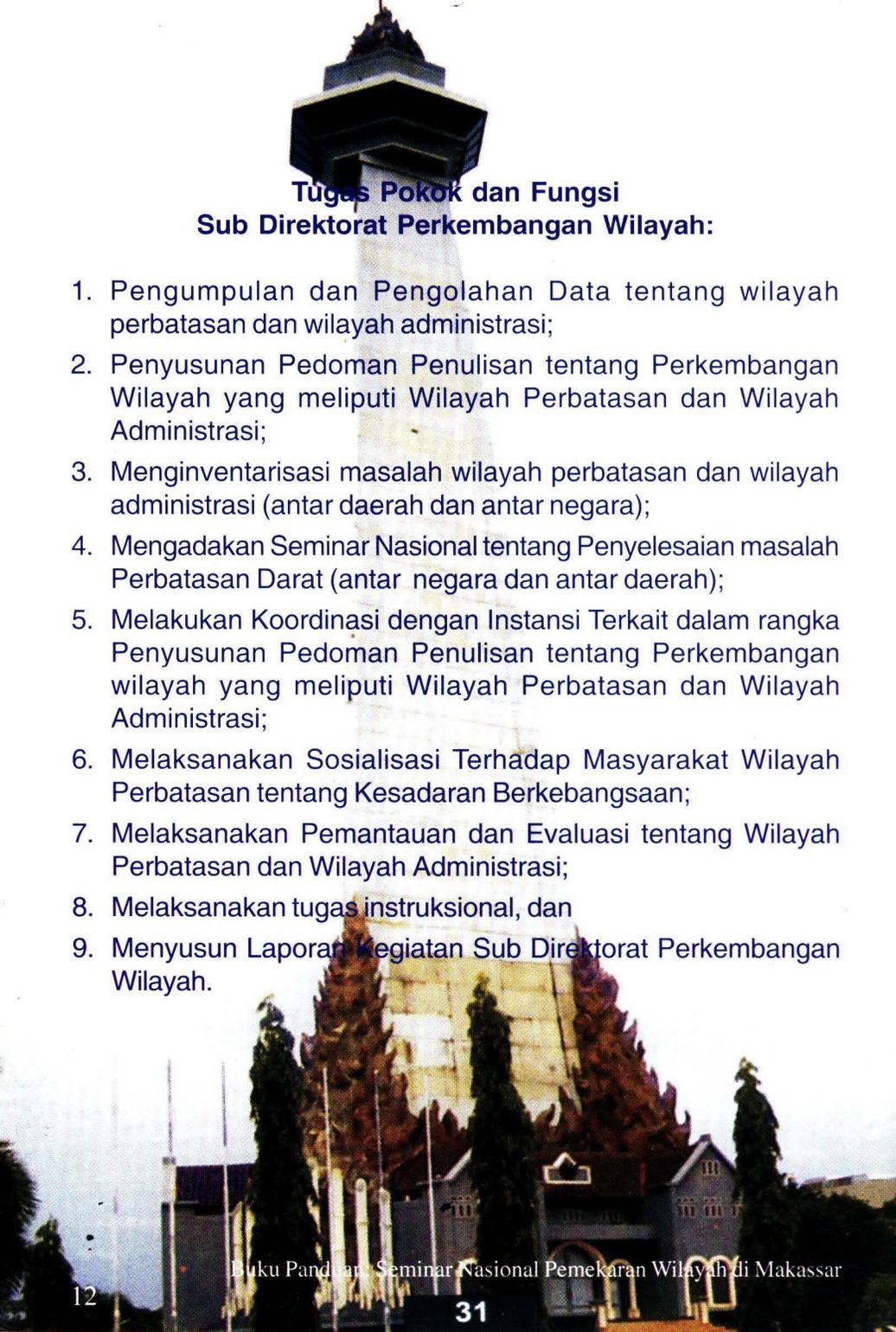
- Aspek Yuridis;
- Aspek Administratif;
- Aspek Geografis;
- Aspek Historis (menyangkut dokumen sumber sejarah yang berkaitan dengan daerah yang bersengketa), dan
- Aspek Sosial Budaya.

b. Fisik meliputi:

- Penempatan/penegasan batas yang berpegang pada kerangka NKRI, sehingga disintegrasi dapat dihindari;
- Perpindahan/perubahan batas setelah sebab-sebab terjadinya perpindahan atau perubahan, dan
- Pelintas batas.

2. Konflik di wilayah perbatasan

Berkaitan dengan kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan baik yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta.



**Tugas Pokok dan Fungsi  
Sub Direktorat Perkembangan Wilayah:**

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data tentang wilayah perbatasan dan wilayah administrasi;
2. Penyusunan Pedoman Penulisan tentang Perkembangan Wilayah yang meliputi Wilayah Perbatasan dan Wilayah Administrasi;
3. Menginventarisasi masalah wilayah perbatasan dan wilayah administrasi (antar daerah dan antar negara);
4. Mengadakan Seminar Nasional tentang Penyelesaian masalah Perbatasan Darat (antar negara dan antar daerah);
5. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Penyusunan Pedoman Penulisan tentang Perkembangan wilayah yang meliputi Wilayah Perbatasan dan Wilayah Administrasi;
6. Melaksanakan Sosialisasi Terhadap Masyarakat Wilayah Perbatasan tentang Kesadaran Berkebangsaan;
7. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi tentang Wilayah Perbatasan dan Wilayah Administrasi;
8. Melaksanakan tugas instruksional, dan
9. Menyusun Laporan Kegiatan Sub Direktorat Perkembangan Wilayah.

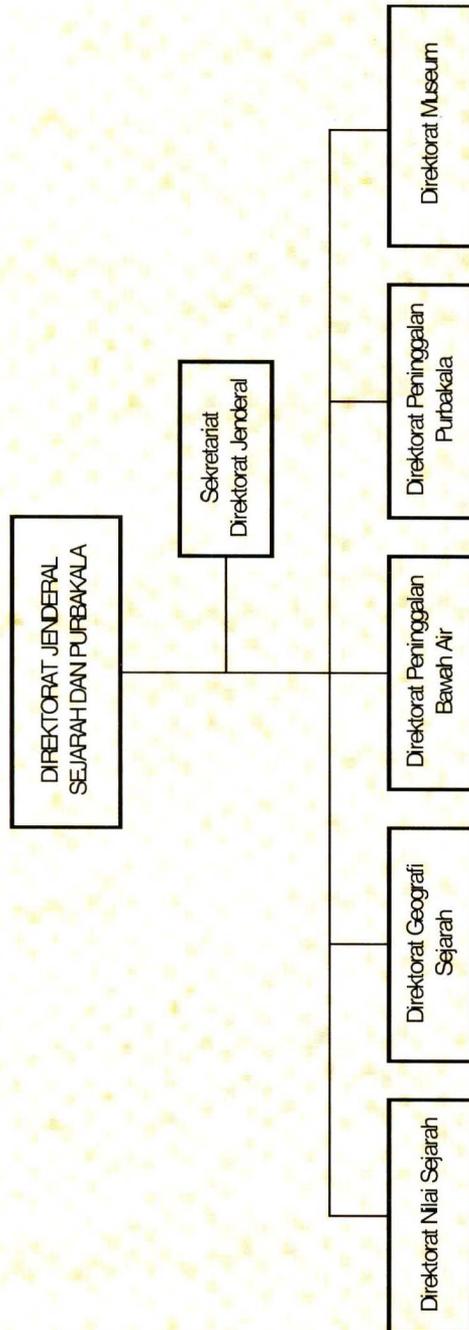
## **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Wilayah Perbatasan :**

1. Menyusun Program Kerja Tahunan Seksi Wilayah Perbatasan;
2. Melakukan Koordinasi hubungan kerja dalam Seksi Wilayah Perbatasan;
3. Melaksanakan Pengumpulan dan Pengolahan Data tentang wilayah perbatasan;
4. Melaksanakan Penyusunan draft/konsep Pedoman Penulisan tentang Perkembangan Wilayah yang meliputi Wilayah Perbatasan;
5. Melaksanakan inventarisasi masalah wilayah perbatasan (antar daerah dan antar negara);
6. Melaksanakan Seminar Nasional tentang Penyelesaian masalah Perbatasan Darat (antar negara dan antar daerah);
7. Melaksanakan Sosialisasi Terhadap Masyarakat Wilayah Perbatasan tentang Kesadaran Berkebangsaan;
8. Melaksanakan Tugas Instruksional, dan
9. Menyusun Laporan Tahunan Seksi Wilayah Perbatasan.

## **Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Wilayah Administrasi :**

1. Menyusun Program Kerja Tahunan Seksi Wilayah Administrasi;
2. Melakukan Koordinasi hubungan kerja dalam Seksi Wilayah Administrasi;
3. Melaksanakan Pengumpulan dan Pengolahan Data tentang wilayah administrasi;
4. Melaksanakan Penyusunan draft/konsep Pedoman Penulisan tentang Perkembangan Wilayah yang meliputi Wilayah Administrasi;
5. Melaksanakan inventarisasi masalah wilayah administrasi (antar daerah dan antar negara);
6. Melaksanakan Seminar Nasional tentang Penyelesaian masalah Perbatasan Darat (antar negara dan antar daerah);
7. Melaksanakan Sosialisasi Terhadap Masyarakat Wilayah Perbatasan tentang Kesadaran Berkebangsaan;
8. Melaksanakan Tugas Instruksional, dan
9. Menyusun Laporan Tahunan Seksi Wilayah Administrasi.





DIREKTORAT  
GEOGRAFI SEJARAH

Sub Bagian  
Tata Usaha

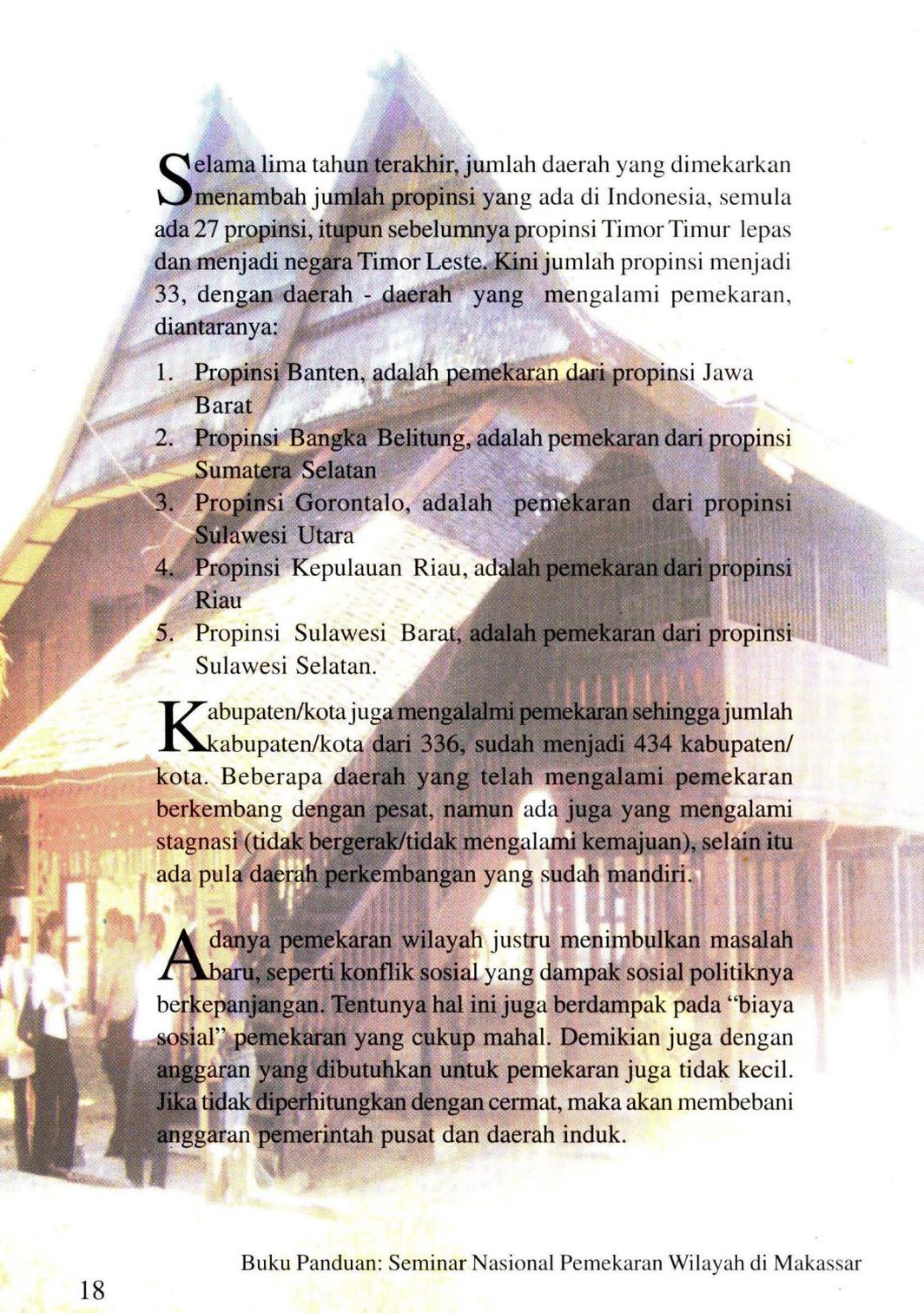


# SEMINAR NASIONAL PEMEKARAN WILAYAH

## A. Latar Belakang

**M**unculnya reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 menimbulkan dampak yang besar. Salah satu agendanya dalam bidang pemerintahan yaitu pelaksanaan otonomi daerah. Sistem sentralisasi yang dijalankan selama pemerintahan Orde Baru telah mengakibatkan hilangnya prakarsa masyarakat sehingga terjadi ketimpangan dalam perolehan pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dituangkan dalam landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Implikasi dari UU otonomi daerah ini adalah adanya pemekaran wilayah baik di tingkat Propinsi maupun kabupaten/kota.

**S**alah satu tujuan UU otonomi daerah adalah bagaimana daerah (Pemerintah daerah) dapat mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri tanpa banyak dicampuri oleh pihak-pihak lain. Urusan pemerintahan akan berarti bila berbagai aspek aktivitas pemerintah (daerah) dapat mendekatkan kepada pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



**S**elama lima tahun terakhir, jumlah daerah yang dimekarkan menambah jumlah propinsi yang ada di Indonesia, semula ada 27 propinsi, itupun sebelumnya propinsi Timor Timur lepas dan menjadi negara Timor Leste. Kini jumlah propinsi menjadi 33, dengan daerah - daerah yang mengalami pemekaran, diantaranya:

1. Propinsi Banten, adalah pemekaran dari propinsi Jawa Barat
2. Propinsi Bangka Belitung, adalah pemekaran dari propinsi Sumatera Selatan
3. Propinsi Gorontalo, adalah pemekaran dari propinsi Sulawesi Utara
4. Propinsi Kepulauan Riau, adalah pemekaran dari propinsi Riau
5. Propinsi Sulawesi Barat, adalah pemekaran dari propinsi Sulawesi Selatan.

**K**abupaten/kota juga mengalami pemekaran sehingga jumlah kabupaten/kota dari 336, sudah menjadi 434 kabupaten/kota. Beberapa daerah yang telah mengalami pemekaran berkembang dengan pesat, namun ada juga yang mengalami stagnasi (tidak bergerak/tidak mengalami kemajuan), selain itu ada pula daerah perkembangan yang sudah mandiri.

**A**danya pemekaran wilayah justru menimbulkan masalah baru, seperti konflik sosial yang dampak sosial politiknya berkepanjangan. Tentunya hal ini juga berdampak pada “biaya sosial” pemekaran yang cukup mahal. Demikian juga dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pemekaran juga tidak kecil. Jika tidak diperhitungkan dengan cermat, maka akan membebani anggaran pemerintah pusat dan daerah induk.

**S**alah satu tujuan UU otonomi daerah adalah bagaimana daerah (Pemerintah daerah) dapat mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri tanpa banyak dicampuri oleh pihak-pihak lain. Urusan pemerintahan akan berarti bila berbagai aspek aktivitas pemerintah (daerah) dapat mendekatkan kepada pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**B**anyaknya usulan pemekaran memang relatif mudah dengan syarat yang kualitatif seperti potensi daerah, kemampuan keuangan, tersedianya Sumber Daya Manusia dan infrastruktur, dan melalui studi kelayakan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 129 tahun 2000 tentang penghapusan, pemekaran dan penggabungan daerah. Dengan syarat yang demikian mudah menyebabkan usulan pemekaran semakin banyak. Menurut Syarif Hidayat (peneliti dari LIPI) mengatakan bahwa pemerintah seharusnya segera membuat Peraturan Pemerintah yang baru untuk memperketat syarat pemekaran daerah/wilayah (Majalah Otonomi, edisi No. 16, 2005 : 6). Dikatakan juga bahwa pemekaran daerah seringkali bermuatan politik, sebab dengan adanya daerah baru, maka akan ada lowongan untuk menduduki kursi kekuasaan baru.

**B**eberapa daerah yang dimekarkan mengalami permasalahan yang perlu diantisipasi, diantaranya adalah masalah konflik sosial, ibukota dan batas wilayah. Faktor ekonomi juga menjadi hal penting bagi suatu daerah untuk layak atau tidak mengalami pemekaran. Biasanya daerah yang ingin dimekarkan adalah daerah yang tertinggal secara ekonomi sehingga ada keinginan untuk maju.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan kegiatan seminar Nasional Pemekaran wilayah di Indonesia ini adalah :

1. Sebagai forum untuk membahas kebijakan, penerapan dan dampak pemekaran wilayah di Indonesia dari berbagai sudut pandang (Sosial dan budaya).
2. Merancang bahan rumusan kebijakan mengenai pemekaran wilayah dan penanggulangan masalah yang ditimbulkan.

Adapun sasaran kegiatan Seminar Nasional ini adalah tersedianya bahan rumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pemekaran wilayah di Indonesia sebagai bahan masukan bagi pengembangan kebijakan di masa yang akan datang.

## **C. Judul dan Tema kegiatan**

Judul kegiatan Seminar Nasional ini adalah **Seminar Nasional Pemekaran Wilayah Dalam Prespektif Sejarah.**

## **D. Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan ini bersifat nasional dengan melibatkan pakar dari instansi terkait khususnya dalam bidang sosial - budaya antara lain: LIPI, Bakosurtanal, Bappenas, Akademisi, pemerintah daerah (Bappeda), dan sejarawan dari berbagai daerah khususnya Sulawesi. Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah dapat merealisasikan proses otonomi daerah dengan memacu pemerataan pembangunan serta meningkatkan

pendayagunaan potensi daerah secara optimal demi pembangunan bangsa.

## **E. Alasan Pemilihan Tempat**

Adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diamandemen dengan UU Nomor 32 tahun 2004 menyebabkan pemekaran wilayah-wilayah baru, baik menjadi propinsi maupun kabupaten/kota baru. Setelah pemekaran dalam perjalanannya banyak terjadi konflik baik secara intern (kedalam) maupun dengan pihak lain: Satu contoh kasus adalah pembentukan propinsi Sulawesi Barat pada tanggal 24 Oktober 2004. Propinsi Sulawesi Barat ini merupakan pemekaran dari propinsi Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya juga propinsi Gorontalo yang merupakan pemekaran dari propinsi Sulawesi Utara. Oleh karenanya maka Seminar Nasional Pemekaran Wilayah ini diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006 Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

## **F. Peserta, Penyaji, dan Panitia**

Peserta dalam kegiatan Seminar Nasional ini diikuti dari berbagai instansi terkait, diantaranya :

- Dirjen Sejarah dan Purbakala
- Direktorat Peninggalan Purbakala.
- Direktorat Geografi Sejarah
- Direktorat Nilai Sejarah.
- Masyarakat Sejarawan Indonesia.
- Bakorsurtanal.
- Bappenas (Direktorat Lingkungan Hidup )

- Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar dan Manado
- Akademisi (IIP Depdagri Jakarta, Univ. Atmajaya Jakarta, Univ. Hassanuddin, Univ. Tadulako, Univ. Haluoleo, Univ. Samratulangi, Univ. Negeri Makassar, Univ. Islam Negeri Makassar, Univ. Negeri Muslim Indonesia, Makassar)
- Pemerintah Daerah (Gubernur Daerah Tk. I, Makassar; Bappeda, Dinas Pariwisata: Gorontalo, Kendari Palu, dan Mamuju)

## **G. Penyelenggara**

Penyelenggara kegiatan ini adalah Direktorat Geografi sejarah, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta. Realisasi penyelenggaraan dituangkan dalam DIPA Direktorat Geografi Sejarah tahun anggaran 2006/2007. di Hotel Sahid Jaya Makassar, Jalan Sam Ratulangi No. 33, Makassar.

## **H. Kegiatan**

- Seminar/Ceramah dari Penyaji dalam rangka Pemekaran.
- Diskusi dalam rangka pemecahan masalah untuk mencapai solusi.
- Pemberian apresiasi tentang otonomi dan pemekaran wilayah kepada peserta seminar.
- Ekskursi/pengenalan wilayah-wilayah daerah pemekaran.

## **I. Fasilitas Pendukung**

- Konsumsi dan akomodasi peserta dari luar Sul-sel (ditanggung panitia)
- Semua peserta baik dari Makassar maupun daerah lainnya mendapatkan konsumsi dan seminar kit, buku panduan, sertifikat, kaos dan topi
- Ruang pertemuan untuk seminar/diskusi.
- Perlengkapan penyajian meliputi tata suara (*Sound system*), LCD projector, OHP (layar tayang), PC/ laptop, dan printer.
- Disediakan kendaraan/kapal phinisi untuk kunjungan lapangan.



15.30 - 16.00 WITA	Rehat	Panitia
16.00 - 17.30 WITA	<b>Sesi IV :</b> 1. "Multikultur Sebagai Salah Satu Solusi Penyelesaian Konflik", Dr. Mungsi Lampe Unhas, Makassar 2. "Pemekaran Wilayah dan Pengelolaan BCB", Andi Said, M.Hum, Kepala BP3 Mks	Moderator : Drs. Soeroso MP, M.Hum Notulis : Drs. Budi Karyawan S
17.30 - 19.00 WITA	Perumusan	Prof. Dr. Taufik Abdullah Prof. Dr. A.B. Lopian Dr. Anhar Gonggong Drs. Soeroso, M.Hum. Drs. Djoko Utomo, M.A. Dr. Susanto Zuhdi dan sejumlah nama dari daerah
19.00 - 20.00 WITA	Makan Malam	Panitia
20.00 - 21.00 WITA	Rangkuman Seminar Penutupan	Prof. Dr. Taufik Abdullah Drs. Hari Untoro Drajad, M.A.
<b>Kamis, 27 April 2006</b> 06.00 - 07.00 WITA	Makan Pagi	
07.00 - 13.00 WITA	Kunjungan Lapangan: Pulau Kayangan/Samalona	Panitia
14.00 WITA	Check Out dari Hotel Sahid Jaya Makassar	



# PROFIL PROVINSI DI PULAU SULAWESI

## 1. PROVINSI SULAWESI UTARA

### Ibukota Manado

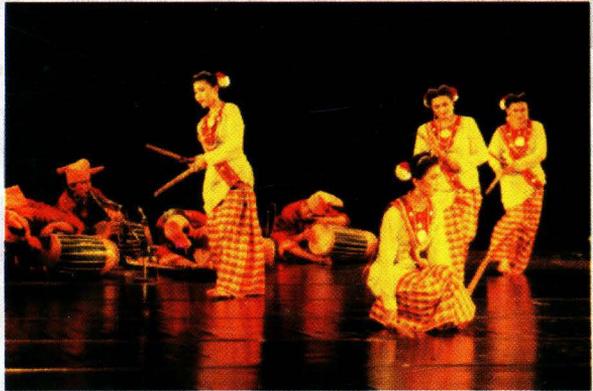
Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus karisidenan dan menjadi bagian dari Propinsi Sulawesi merupakan daerah tingkat I yang berada paling ujung Utara Nusantara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1960, propinsi Sulawesi dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

Propinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Propinsi Sulawesi Utara-Tengah. Gubernur pertama Sulawesi Utara-Tengah adalah MR.A.A Baramuli dan wakil Gubernur Letkol F.J. Tumbelaka.

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah adalah

Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo dan 8 daerah tingkat II yaitu Sangitalaud, Bolaang Mongandow, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso dan Luwuk/Banggai.

Perubahan status daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah menjadi Sulawesi Utara ditetapkan dengan UU Nomor 13 tahun 1964 pada tanggal 23 September 1964. Ibukota Sulawesi Utara adalah Manado dan secara de facto Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Fisiognomi daerahnya membentang dari utara ke Selatan Barat Daya dari Pulau Miangas Ujung Utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai Molosipat di bagian Barat Kabupaten Gorontalo. Hingga samapi tahun 2000 wilayah administrasi Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari 5 Kabupaten dan 3 kotamadya, yaitu Kab. Minahasa, Balaang Mangandow, Gorontalo, Sangihe dan Talaud, dan Boulemo sedangkan Kotamadya meliputi Manado, Bitung dan Gorontalo.



Adanya reformasi dan otonomi daerah menyebabkan pemekaran wilayah yaitu dengan terbentuknya Propinsi Gorontalo melalui UU Nomor 38 tahun 2000; 2002 dan 2003, propinsi Sulawesi Utara menambah Kabupaten Talaud dengan UU Nomor 8 tahun 2002 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sangihe Talaud juga kabupaten Minahasa Selatan dan Tomohon yang merupakan pemekaran Kabupaten Minahasa. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2003 maka dengan demikian Propinsi Sulawesi Utara menjadi 9 wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu :

1. Kab. Bolaang Mangadaw;
2. Kab. Minahasa;
3. Kab. Minahasa Selatan;
4. Kab. Minahasa Utara;
5. Kab. Sangihe;
6. Kab. Talaud;
7. Kota Manado;
8. Kota Bitung, dan
9. Kota Tomohon.

## **2. PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### **Ibukota Makassar**

Sebelum Proklamasi RI, Sulawesi Selatan, terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan yang berdiri sendiri dan didiami 4 etnis yaitu : Bugis, Makassar, Madar dan Toraja. Ada 3 kerajaan besar yang berpengaruh luas yaitu Luwu, Gowa dan Bone, yang pada abad XVI dan XVII mencapai kejayaannya dan telah melakukan hubungan dagang serta persahabatan dengan bangsa Eropa, India, Cina, Melayu dan Arab. Setelah kemerdekaan, dikeluarkan UU Nomor 21 tahun 1950 dimana Sulawesi Selatan menjadi provinsi administratif Sulawesi dan selanjutnya pada tahun 1960 menjadi daerah otonomi Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1960. Pemisahan Sulawesi Selatan dari otonomi Sulawesi dan Tenggara ditetapkan dengan UU Nomor 13 tahun 1964, sehingga menjadi daerah otonomi Sulawesi Selatan.

Sulawesi Selatan terletak di jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Luas wilayahnya 62.482.54 km<sup>2</sup> ( 42% dari luas seluruh pulau Sulawesi dan 4.1% dari luas seluruh Indonesia). Posisi yang strategis di kawasan timur Indonesia memungkinkan Sulawesi Selatan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, baik bagi kawasan timur Indonesia maupun untuk skala Internasional. Pelayanan tersebut mencakup perdagangan, transportasi darat- laut- udara, pendidikan, pendaya-gunaan tenaga kerja, pelayanan dan pengembangan,

kesehatan, penelitian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, air payau tambak, kepariwisataan bahkan potensial untuk pengembangan lembaga dan perbankan

Makassar sebuah kota pantai, kota dagang, kota industri, kota pendidikan, kota budaya dan pariwisata; yang terletak di sisi barat jazirah selatan pulau Sulawesi. Kota yang dijuluki kota Angin Mammiri (= angin bertiup) Sebagai kota pantai/ maritim didukung oleh letak pelabuhan Soekarno-Hatta yang berada pada lokasi yang strategis. Pemandangan yang sangat menakjubkan pada sore menjelang senja dengan latar belakang panorama yang indah "losari" sebuah tempat rekreasi yang sangat populer dan menjadi kebanggaan masyarakat Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Pantai ini terletak di sisi barat kota Makassar, menawarkan pemandangan laut yang indah terlebih pada senja hari sembari menikmati keindahan matahari terbenam.

### **3. PROVINSI GORONTALO**

#### **Ibukota Gorontalo**

Secara geografis Provinsi Gorontalo terletak antara 123° 08' 04" – 123° 32' 09" Bujur Timur (BT) dan 00° 24' 04" – 01° 02' 30" Lintang Utara (LU) dengan luas wilayah 12.215,45 km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah Provinsi Gorontalo adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara;
- Sebelah selatan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Provinsi Gorontalo diresmikan pada tanggal 16 Februari 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000. Wilayah Provinsi Gorontalo terbagi atas 4 kabupaten dan 1 kotamadya yang juga merupakan ibukota provinsi.

#### **Pemerintahan:**

Kabupaten dan Kota:

1. Kab. Boalemo;
2. Kab. Bone Bolango;
3. Kab. Gorontalo
4. Kab. Pohuwato
5. Kota Gorontalo

Sebagian besar wilayah Gorontalo terdiri dari Pegunungan yang membentang dari utara hingga ke selatan dengan pemandangan yang sangat indah dan mempesona. Pesona kawasan laut pun menawarkan keindahan, berada di bagian selatan yang lebih dikenal dengan sebutan “teluk Tomini” menyajikan hamparan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni yang dikelilingi pantai pasir serta pesona bawah laut yang menghadirkan keanekaragaman mahluk hidup yang menghiasinya. Hal tersebut bisa saja terjadi karena teluk Tomini merupakan salah satu kawasan yang dilintasi oleh garis khatulistiwa sehingga batu karang yang indah membentang dapat dinikmati dari permukaan laut dengan menggunakan kapal-kapal kecil.

#### **4. SULAWESI TENGAH**

##### **Ibu Kota Palu**

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebelum jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda, merupakan sebuah Pemerintahan Kerajaan yang terdiri atas 15 kerajaan di bawah kepemimpinan para raja yang selanjutnya dalam sejarah Sulawesi Tengah dikenal dengan julukan Tujuh Kerajaan di Timur dan Delapan Kerajaan di Barat.

Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan Di Timur dan Delapan Kerajaan Di Barat, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda yang meliputi, antara lain :

1. Poso Lage di Poso;
2. Lore di Wiange;
3. Tojo di Ampaña;
4. Pulau Una-una di Una-una;
5. Bungku di Bungku;
6. Mori di Kolonodale;
7. Banggai di Luwuk;
8. Parigi di Parigi;
9. Moutong di Tonombo;
10. Tawaeli di Tawaeli;
11. Banawa di Donggala;
12. Palu di Palu;
13. Sigi/Dolo di Biromaru;
14. Kulawi di Kulawi;
15. Toli-toli di Toli-toli.

Dalam perkembangannya, ketika Pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan sudah tidak berkuasa lagi di Sulawesi Tengah serta Indonesia, Pemerintah Pusat kemudian membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi 3 (tiga) bagian yakni :

1. Sulawesi Tengah bagian Barat, meliputi wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabutan Buol Toli-Toli. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Sulawesi Tengah bagian Tengah (Teluk Tomini) masuk Wilayah Karisidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1919, seluruh Wilayah Sulawesi Tengah masuk wilayah Karisidenan Sulawesi Utara di Manado, pada tahun 1940, Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 Afdeeling Donggala yang meliputi Tujuh Onder Afdeeling dan Lima Belas Swapraja.
3. Sulawesi Tengah bagian Timur (Teluk Tolo) masuk Wilayah Karisidenan Sulawesi Timur Bau-bau.

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingati sebagai Hari Lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah.

## PEMERINTAHAN

### Kabupaten dan Kota

1. Kabupaten Banggai
2. Kabupaten Buol
3. Kabupaten Donggala
4. Kabupaten Kepulauan Banggai
5. Kabupaten Morowali
6. Kabupaten Parigi Moutong
7. Kabupaten Poso
8. Kabupaten Tojo Una-Una
9. Kabupaten Toli-Toli
10. Kota Palu.



## 5. SULAWESI BARAT

### Ibu Kota Mamuju

Sulawesi Barat adalah provinsi baru yang merupakan pecahan provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan UU No 26 Tahun 2004. Ibukotanya ialah Mamuju. Luas wilayah sekitar 16,769.19 Km<sup>2</sup>. dan terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan lain-lain (19,15%).

#### PEMERINTAH

##### Kabupaten dan Kota

1. Kabupaten Majene
2. Kabupaten Mamasa
3. Kabupaten Mamuju
4. Kabupaten Mamuju Utara
5. Kabupaten Polewali Mandar
6. Kota Mamuju.



## 6. Sulawesi Tenggara

### Ibu Kota Kendari

Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasar Perpu No.2 tahun 1964 Juncto UU No 13 Tahun 1964. Pada awalnya terdiri atas 4 (empat) kabupaten yaitu : Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna dan Kabupaten buton dengan Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi. Setelah pemekaran, Sulawesi Tenggara mempunyai 10 kabupaten dan kota.

#### Pemerintahan

##### Kabupaten dan Kota

1. Kabupaten Bombana
2. Kabupaten Buton
3. Kabupaten Kolaka
4. Kabupaten Kolaka Utara
5. Kabupaten Konawe (dulu bernama Kabupaten Kendari)
6. Kabupaten Konawe Selatan
7. Kabupaten Muna
8. kabupaten Wakatobi

## 9. Kota bau-Bau

## 10. Kota Kendari

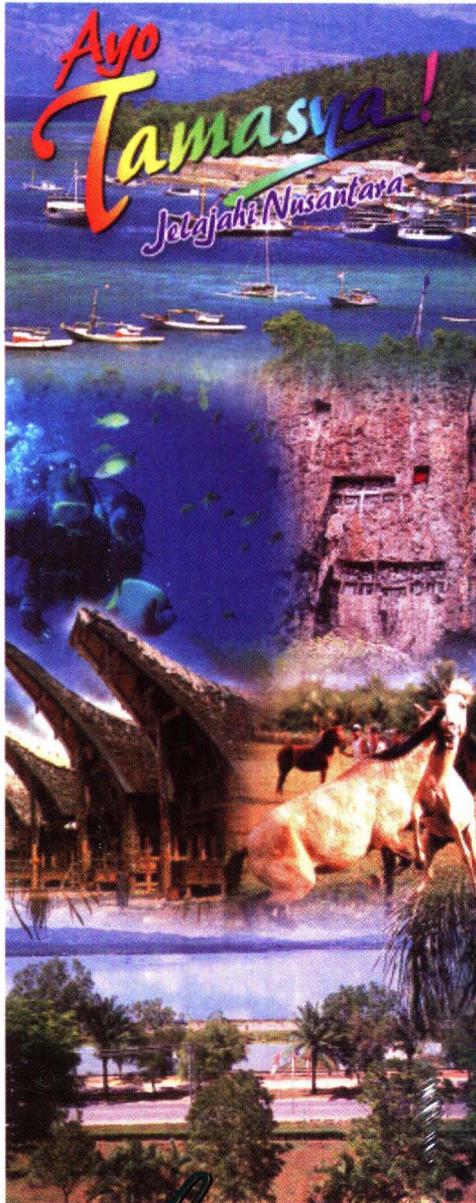
Kabupaten Kendari adalah lumbung beras bagi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Setiap tahun kabupaten ini menghasilkan paling sedikit 70.000 ton beras dari hamparan sawah seluas 60.000 hektar. Tidak heran jika kabupaten yang berpenduduk 418.630 jiwa ini telah mencapai surplus beras sejak tahun 1989, makanan non-beras pun melimpah. Sagu tumbuh hampir di seluruh daratan jazirah Sultra, dan masih menjadi banyak bahan makanan sebagian besar penduduk setempat.

Bahan makanan melimpah, dan kondisi sosial ekonomi penduduk juga relative baik, akan tetapi kondisi prasarana perhubungan di daerah pedalaman kabupaten ini masih sangat memprihatinkan. Maka pemda kabupaten sekarang ini meletakkan prasarana pembangunan untuk membuka tabir isolasi sebagai prioritas utama. Sumber dana yang sangat terbatas memaksa pembangunan tersebut harus dilakukan bertahap sesuai kemampuan dana yang tersedia.

### Sumber:

1. Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, September 2005, Jakarta
2. Profil Daerah Kabupaten Kota, Jilid Pertama, 2001, Penerbit Kompas Jakarta





*Sulawesi*

Perpustakaan  
Jenderal

3